

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Hasil analisis data kuantitatif secara umum tentang pengaruh kebijakan pembinaan pemerintah terhadap kemandirian SLTP Swasta adalah sebagai berikut:

Pertama, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa latar belakang penyelenggara SLTP Swasta terhadap pembinaan ketenagaan berpengaruh positif sebesar 0.184 atau sekitar 18.4%, dan terhadap bantuan sarana prasarana 0.263 atau sekitar 26.3%.

Kedua, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa potensi SLTP Swasta terhadap pembinaan ketenagaan berpengaruh positif sebesar 0.409 atau sekitar 40.9%, dan terhadap bantuan sarana prasarana berpengaruh negatif sebesar 0.146 atau sekitar 14.6%.

Ketiga, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel intervensi yaitu pembinaan ketenagaan terhadap kemandirian SLTP Swasta berpengaruh positif sebesar 0.264 (26.4%).

Keempat, temuan empirik menunjukkan bahwa kebijakan pembinaan pemerintah khususnya pembinaan ketenagaan dan sarana prasarana sangat mendorong SLTP Swasta untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Nilai $F = 5.738$ (lebih besar dari nilai $F_{0.05(4, 79)} = 0.122$ dengan probabilitas $0.005 = 0.05$ dengan kekuatan pengaruh variabel ternyata yang paling dominan adalah variabel

pembinaan ketenagaan mencapai 0.264 (26.4%) dan bantuan sarana prasarana 0.244 (24.4%), dengan toleransi < 1 dan $VIF > 1$.

Dengan demikian, kebijakan pembinaan ketenagaan dan bantuan sarana prasarana dari pemerintah, sangat membantu SLTP Swasta untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan serta mendorong kemandirian.

B. Implikasi

Pertama, dengan bervariasinya latar belakang badan penyelenggara dan potensi SLTP Swasta di Kabupaten Bandung, mulai dari yayasan yang paling berpotensi rendah di daerah IDT sampai pada yang berpotensi dan berpeluang tinggi di perkotaan, tampaknya kebijakan pemerintah dalam memberikan pembinaan ketenagaan dan bantuan sarana prasarana masih dipandang strategis sebagai pendorong kemandirian sekolah.

Kedua, pemetaan kondisi latar belakang dan potensi SLTP Swasta sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan pembinaan ketenagaan dan bantuan sarana prasarana sangat diperlukan. Data yang akurat dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan makna kebijakan, yaitu keadilan dan pemerataan dengan tujuan mendorong kemandirian sekolah.

Ketiga, pembinaan ketenagaan baik yang berupa bantuan tenaga guru (DPK), guru bantu (kontrak), dan bentuk pendidikan serta pelatihan memberikan pengaruh positif terhadap kemandirian sekolah. Hal itu dapat dimengerti mengingat sumber daya manusia merupakan komponen strategis dalam pengembangan sekolah. Akan

tetapi sudah saatnya, SLTP Swasta melakukan rekrutment tenaga guru (tetap) sendiri dengan pemberian sistem penggajian sesuai dengan kebutuhan hidup minimum.

Keempat, pembinaan ketenagaan dan bantuan sarana dan prasarana secara umum, memberikan pengaruh positif, akan tetapi kebijakan di kemudian hari harus diubah melalui pola selektivitas yang berkaitan dengan latar belakang penyelenggara dan potensi sekolah agar tidak menjadi ketergantungan kepada pemerintah dari pihak penyelenggara.

C. Rekomendasi

Sesuai dengan temuan penelitian maka direkomendasikan sebagai berikut:

1. Pola pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi perlu ditindaklanjuti oleh Kabupaten dan Kota melalui kerjasama dengan *Local Educational Centre (LEC)*. Garapan konkretnya, adalah menggerakkan SLTP Swasta di setiap cluster/sub cluster dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, melalui pemetaan sekolah, pelayanan informasi kebijakan, pelaksanaan pelatihan guru mata pelajaran dan tenaga kependidikan lainnya tingkat SLTP Swasta.
2. Kebijakan pemerintah berkenaan dengan pembinaan ketenagaan dan bantuan sarana prasarana, harus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan hasil pemetaan yang dilandasi oleh latar belakang dan potensi sekolah yang benar-benar dapat dijadikan stimulus, yang dilandasi oleh rasa keadilan dan

pemerataan. Artinya pembinaan dan bantuan diarahkan kepada yang belum memperoleh.

3. Sampai saat ini belum ada satu standar baku mengenai kriteria kemandirian sekolah swasta. Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan perlu segera menyusun dan mengeluarkan peraturan dan syarat-syarat, kriteria berkenaan dengan kemandirian SLTP Swasta termasuk masalah ketenagaan.
4. Perlu adanya etos kemandirian yang kuat dalam tubuh organisasi penyelenggara (yayasan), dan sekolah yang dibangun melalui komitmen dan budaya mutu pelayanan pendidikan khususnya SLTP Swasta.
5. Perlu adanya budaya mutu, melalui sikap kemandirian penyelenggara dengan mengeksplorasi peluang yang tidak hanya dari pihak pemerintah saja melainkan masyarakat secara luas seperti dunia usaha, badan amal nasional atau internasional.
6. Bagi yang berminat melakukan penelitian yang fokusnya berkenaan dengan masalah kebijakan pemerintah terhadap SLTP Swasta, dapat ditindaklanjuti melalui penelitian yang mengarah kepada peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dasar.

